

ISBN: 978-602-74335-0-2

**Seminar Nasional
Ekonomi dan Bisnis
Global Competitive Advantage**

2016

“Membangun Ekonomi dan Bisnis Inklusif”

PROSIDING

Palembang, 06-07 April 2016

Universitas Bina Darma

Supported by:



BANK INDONESIA



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FINANCIAL DISTRESS

Sri Husniati¹, Fitriasuri², Roliah Wahasumiah³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang

¹Email: srihusniati@gmail.com

²Email: fitriasuri@binadarma.ac.id

³Email: rolia.wahasumiah@binadarma.ac.id

Abstract

This study aims to predicted financial distress at the provincial government in Indonesia. Where, in the public sector is defined as the inability of the government to provide public services at a decent level. There are two factors to predict the occurrence of financial distress, namely financial factors consist of financial independence, the degree desentralisasi, solvency, financial performance, financial position, efficiency, whereas non-financial factor consists of the complexities of government and regional expansion. This study used 12 samples of the provincial government in Indonesia coming from the interior ministry and BPS. Purposive sampling method and using logistic regression analysis. The results showed that only the degree of decentralization that is positively and significantly to the prediction of financial distress in the provincial government in Indonesia.

Keywords: *Financial Distress, Financial Factors, Non Financial Factors.*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa, tetapi keberhasilan program ini mulai banyak dipertanyakan. Menurut FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi) menilai kinerja pemerintah dari sisi alokasi belanja, bisa dikatakan belum maksimal. Pada RAPBN 2012, belanja pegawai merupakan alokasi belanja tertinggi, sebesar Rp. 215,7 triliun. Bahkan mengalahkan belanja subsidi yang selama ini mendominasi. Perilaku boros pemerintah daerah provinsi menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah pada kondisi kebangkrutan atau krisis.

Pada sektor publik, Jones dan Walker, 2007 dalam Syurmita (2014) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik. Kondisi kekurangan atau ketersediaan dana ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan. Pada penelitian ini untuk memprediksi *financial distress* pada pemerintah provinsi di Indonesia peneliti menggunakan dua faktor yaitu faktor keuangan dan non keuangan. Faktor keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio solvabilitas, rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi. sedangkan, faktor non keuangan terdiri kompleksitas pemerintah dan pemekaran daerah.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka teori

Menurut Ardhini (2011) rasio kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah. Menurut Tris (2012) rasio derajat desentralisasi adalah

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajibannya. Menurut Sigit Hendradyadi (2011) rasio kinerja keuangan adalah rasio untuk menilai kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerahnya.

Menurut Sutaryo (2010) rasio posisi keuangan *position government wealth* (POSGW) merupakan ukuran untuk posisi keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara jumlah total bersih *asset* dengan jumlah total pendapatan. Menurut Pramono (2014) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Sedangkan, faktor non-keuangan dalam penelitian ini Kompleksitas pemerintah dalam penelitian ini dilihat dari populasi penduduk suatu wilayah yang mencerminkan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh wilayah (pemerintah daerah) tersebut dan Pemekaran daerah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten atau kota menjadi lebih dari satu wilayah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Financial Distress

Pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah rendah akan membutuhkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi pemerintah daerah provinsi, sumber dana tersebut diantaranya dapat berasal dari dana transfer pemerintah pusat (dana peimbangan). Sesuai pandangan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah daerah yang memiliki kemandirian sumber daya keuangan akan memiliki kekuatan untuk *survive* dan terhindar dari *financial distress*. Kemandirian keuangan juga telah digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah (Cheng, 1992; christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007), Kloha, weissert, dan Kleine (2005) dalam Syurmita, 2014). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1: Kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Financial Distress

Pemerintah provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat, agar dapat mendanai program-programnya. Sedangkan provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dapat menyelenggarakan desentralisasi dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak, disamping dan transfer (perimbangan). Jones dan Walker, 2007 dalam Syurmita (2014) meneliti *financial distress* pada pemerintah lokal dinegara bagian Australia (New South Wales). Hasil temuannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana pemerintah federal diprediksi mengalami *financial Distress*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Financial Distress

Wibowo dan Sumekno, 2013, dalam Syurmita, (2014) menggunakan *Current Liability Ratio*, dan *Debt to Revenue Ratio* sebagai informasi akuntansi relevan dalam mengukur *financial distress* pemerintah daerah di Jawa Timur. Penelitiannya menghasilkan adanya hubungan yang cukup kuat dan searah antara ketiga variabel tersebut dengan *financial distress*. Sutaryo, dkk (2010) menggunakan *Current Liability Government Wealth*, *Current Liabilities*, *Long Term Debt to Total Asset*, dan *Debt to*

Revenue sebagai nilai relevan informasi laporan keuangan terkait *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel-variabel tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya berpengaruh positif terhadap *financial distress*

Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan terhadap *Financial Distress*

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio *performance government wealth* yang menggunakan jumlah surplus atau defisit atas realisasi atas APBD. Jika pemerintah daerah mempunyai jumlah surplus yang tinggi, maka pemerintah daerah tersebut mempunyai angka rasio kinerja keuangan yang tinggi. Namun demikian selisih (surplus) yang tinggi tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pembangunan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai probabilitas yang besar untuk mengalami *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Rasio kinerja keuangan *performance government wealth* (PERGW) berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Pengaruh Rasio Posisi Keuangan terhadap *Financial Distress*

Plammer et al, 2007, dalam Sutaryo, (2010) menggunakan indikator posisi keuangan pemerintah berupa *position government wealth* (POSGW). Rasio ini menggambarkan jumlah total dana pemerintah atas jumlah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi angka rasio ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah dana yang tinggi hingga mampu membiayai proses kegiatan pemerintah dalam menyediakan pelayanan, sehingga semakin kecil kemungkinan daerah mengalami *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5 : Rasio posisi keuangan *Position government wealth ratio* (POSGW) berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap *Financial Distress*

Level of capital outlay ratio (LCO) juga digunakan oleh Groves et al. (2001) dalam Sutaryo (2009) untuk menggambarkan efisiensi pemerintah. *Level of capital outlay ratio* (LCO) merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran modal terhadap pendapatan operasional atau pendapatan asli daerah. Tingginya angka rasio ini memberikan penggambaran bahwa pemerintah daerah dalam kondisi yang efisiensi, karena pemerintah daerah mampu melakukan penghematan atas pendapatan asli daerah hingga mampu melakukan pengeluaran modal yang tinggi. Semakin tinggi angka rasio ini semakin besar probabilitas daerah untuk mengalami *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H6 : Rasio efisiensi *Level of capital outlay ratio* (LCO) berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Pengaruh Kompleksitas terhadap *Financial Distress*

Populasi dianggap sebagai ukuran pembayaran transfer pemerintah berkaitan dengan jumlah sumber daya yang mungkin dapat disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (agen). Jadi kota dengan populasi yang lebih besar diperkirakan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik karena lebih banyak

sumber daya yang dipertaruhkan (Evans dan Patton, 1987 dalam Syurmita, 2014). Christaens (1999) dan Christaens dan Pateghem (2007) dalam Syurmita (2014) menemukan bahwa kota besar dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip akuntansi. Penelitian ini juga menduga bahwa semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki sebuah provinsi, maka probabilitas mengalami *financial distress* akan semakin kecil dikarenakan populasi penduduk menggambarkan besaran hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H7 : Kompleksitas pemerintahan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap *Financial Distress*

Amitabh, 2006 dalam Syurmita (2014) menggunakan umur (pengalaman) sebagai indikator dalam menilai kinerja pelaporan keuangan institusi pemerintah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa pertumbuhan umur institusi pemerintah akan meningkatkan kinerja dan pengalaman mereka dalam praktik laporan keuangan. Hussein, 2008 dalam Syurmita (2014) juga menggunakan umur organisasi dalam menjelaskan variasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagaimana berikut.

H8 : Pemekaran daerah pemerintah berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen dan catatan yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak perantara, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan BPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari keuangan dan non keuangan.

Operasional Variabel Penelitian

Pada Penelitian ini terdapat 9 (sembilan) variabel yang akan diujikan, yaitu satu variabel *dependent* (terikat) *Financial Distress* (Y), serta 8 (delapan) Variabel *independent* (bebas) yaitu: Kemandirian keuangan (X₁), derajat desentralisasi (X₂), solvabilitas (X₃), kinerja keuangan (X₄), posisi keuangan (X₅), efisiensi (X₆), kompleksitas pemerintah (X₇), Pemekaran daerah (X₈).

Teknik Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner (*binary logistic regression*) dengan bantuan SPSS versi 22. Regresi logistik biner digunakan apabila variabel dependennya berupa variabel dikotomi atau variabel biner. Dalam penelitian ini, *financial distress* merupakan variabel dikotomi yang memiliki dua tingkatan berbeda, yaitu pemerintah provinsi yang mengalami *financial distress* dan pemerintah provinsi yang tidak mengalami *financial distress*. Selain untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen terhadap variabel dependen yang berupa variabel dependen y (yang berupa variabel biner) berdasarkan nilai variabel-variabel independen X₁, X₂,..., X_k. Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Log} \left(\frac{p}{1-p} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + e$$

Dimana p adalah kemungkinan bahwa Y= 1 (*financial distress*), dan X₁, X₂, X₃, X₄, X₅, X₆, X₇, X₈ adalah variabel independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Nilai Likelihood

Hasil pengujian model regresi diperoleh nilai -2LogL sebesar 0.000 nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian sebesar 5%. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa penambahan variabel independen berupa Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Solvabilitas, Kinerja Keuangan *Performance Government* (PERGW), Posisi Keuangan *Position Government* (POSTGW), Efisiensi, Kompleksitas Pemerintah, Pemekaraan Daerah ke dalam model penelitian dapat memperbaiki model *fit*.

Uji Nilai Nagelkerke R^2

Hasil pengujian nilai *Nagelkerke R^2* dalam penelitian ini adalah sebesar 1.000. Hasil pengujian ini berarti variabilitas variabel dependen yaitu *Financial Distress* dapat dijelaskan oleh variabel Independen Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Solvabilitas, Kinerja Keuangan *Performance Government* (PERGW), Posisi Keuangan *Position Government* (POSTGW), Efisiensi, Kompleksitas Pemerintah, Pemekaraan Daerah.

Uji Nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Pada tabel tersebut terlihat bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* adalah 0.000 dengan tingkat signifikan 1.000 yang nilainya jauh diatas 0,05. Angka tingkat signifikan $> 0,05$ sehingga H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah *fit* dan model dapat diterima sehingga dapat digunakan untuk memprediksi observasi dalam penelitian.

Pembahasan

1. Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Berpengaruh Negatif Terhadap *Financial Distress*

Hasil hipotesis pertama (H_1) diperoleh dari hasil nilai tingkat signifikansi pada hasil uji t untuk variabel kemandirian keuangan sebesar 0,420 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -0,801. Dari hasil penelitian tentang prediksi *financial distress* menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress*, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Jadi semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahnya maka semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (dana dari pemerintah pusat). Dengan demikian hipotesis rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress* ditolak.

2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi Berpengaruh Positif Terhadap *Financial Distress*

Hasil hipotesis pertama (H_2) diperoleh dari hasil nilai tingkat signifikansi pada hasil uji t untuk variabel derajat desentralisasi sebesar 0,077 lebih kecil dari 0,10 ($\alpha=10\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 5,356. Dari hasil penelitian tentang prediksi *financial distress* menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang signifikan. Jadi semakin rendah besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah maka semakin tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian hipotesis rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress* diterima.

3. Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Melunasi Kewajibannya Berpengaruh Positif Terhadap *Financial Distress*

Hasil hipotesis pertama (H_3) diperoleh dari hasil nilai tingkat signifikansi pada hasil uji t untuk variabel solvabilitas sebesar 0,432 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -0,009. Hasil penelitian tentang prediksi *financial distress* menyatakan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Jadi semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya maka akan dijamin atau ditutupi oleh aset pemerintah daerahnya. Dengan demikian hipotesis rasio solvabilitas daerah berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress* ditolak.

4. Rasio Kinerja Keuangan *Performance Government Wealth* Berpengaruh Positif Terhadap *Financial Distress*

Hasil hipotesis pertama (H_4) diperoleh dari hasil nilai tingkat signifikansi pada hasil uji t untuk variabel kinerja keuangan sebesar 0,412 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 21,836. Hasil penelitian tentang prediksi *financial distress* menyatakan bahwa rasio kinerja keuangan tidak berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Jadi semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya maka semakin rendah ketergantungan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian hipotesis rasio kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress* ditolak.

5. Rasio Posisi Keuangan *Position Government Wealth (POSGw)* Berpengaruh Negatif Terhadap *Financial Distress*

Hasil hipotesis pertama (H_5) diperoleh dari hasil nilai tingkat signifikansi pada hasil uji t untuk variabel posisi keuangan sebesar 0,193 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,675. Hasil penelitian tentang prediksi *financial distress* menyatakan bahwa rasio posisi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Jadi semakin rendah angka rasio ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang sesuai mutu yang ditetapkan kepada masyarakat dikarenakan rendahnya dana yang dikeluarkan dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis rasio posisi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress* ditolak.

6. Rasio Efisiensi *Level of capital outlay ratio (LCO)* berpengaruh positif terhadap *financial distress*

Hasil hipotesis pertama (H_6) diperoleh dari hasil nilai tingkat signifikansi pada hasil uji t untuk variabel efisiensi sebesar 0,185 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 2,768. Hasil penelitian tentang prediksi *financial distress* menyatakan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Jadi semakin rendah angka rasio ini maka semakin kecil pemerintah daerah tersebut mengalami *financial distress*. Dengan demikian hipotesis rasio posisi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress* ditolak.

7. Kompleksitas Pemerintah Berpengaruh Negatif Terhadap *Financial Distress*

Hasil hipotesis pertama (H_7) diperoleh dari hasil nilai tingkat signifikansi pada hasil uji t untuk variabel kompleksitas pemerintah sebesar 0,951 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -0,123. Hasil penelitian tentang prediksi *financial distress* menyatakan bahwa kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress*, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Jadi semakin semakin besar suatu provinsi maka semakin besar atau banyak juga penduduk yang dimiliki provinsi tersebut sehingga diprediksi mengalami *financial distress* karena akan semakin tinggi pula besaran transfer pemerintah pusat yang menyebabkan provinsi tersebut ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian hipotesis kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress* ditolak.

8. Pemekaran Daerah Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap *Financial Distress*

Hasil hipotesis pertama (H_8) diperoleh dari hasil nilai tingkat signifikansi pada hasil uji t untuk variabel pemekaran daerah sebesar 0,741 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -0,158. Hasil penelitian tentang prediksi *financial distress* menyatakan bahwa pemekaran daerah tidak berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Jadi pemerintah daerah provinsi yang diprediksi tidak mengalami *financial distress* di karenakan nilai koefisiensinya negatif yang menunjukkan bahwa semakin sedikit daerah provinsi yang mengalami pemekaran daerah maka semakin rendah penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada pemerintah provinsi tersebut, dimana pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai yang tidak terkendali sehingga terjadi pemborosan belanja pegawai (belanja Rutin).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan terhadap 12 sampel pemerintah provinsi di Indonesia pada periode 2014 yaitu Hasil pengujian hipotesis variabel Kemandirian Keuangan, solvabilitas, kinerja keuangan, efisiensi dan pemekaran daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap prediksi *financial distress*. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (mampu mengelola sendiri kegiatan pemerintahnya dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah). Hasil pengujian hipotesis variabel posisi keuangan dan kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap prediksi *financial distress*. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi tidak mengalami *financial distress* karena semakin besar populasi penduduk diketahui tidak akan mengalami *financial distress* karena jumlah penduduk yang besar menunjukkan kepemilikan sumber daya yang baik. Hasil pengujian hipotesis variabel derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prediksi *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan positif mengalami *financial distress*.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat yaitu pemerintah provinsi lebih aktif dan lebih transparan dalam mempublikasikan pelaporan keuangan pemerintah provinsi di website masing-masing karena berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengharuskan pemerintah provinsi untuk transparan dalam informasi di pemerintahan. Memperpanjang

periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperbesar jumlah sampel selain pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten/kota sebagai objek penelitian.

6. REFERENSI

- [1] Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [2] Hendradyadi, Sigit. 2011. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro
- [3] Pramono. 2014. *Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Surakarta.
- [4] Republik Indonesia (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengharuskan pemerintah provinsi untuk transparan dalam informasi di pemerintahan.
- [5] Sutaryo. 2010. *Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan terhadap financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- [6] Syurmita. 2014. *Prediksi financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Lombok.
- [7] Tris, Dodi (2012). *Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. (Online). Tersedia: <http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/11/keuangan-daerah.html>. (8 November 2015).

